

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Gini terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Bali periode 2013–2023, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut cenderung meningkat melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
2. Pertumbuhan Ekonomi tidak selalu memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap peningkatan IPM. Meskipun pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan output daerah, namun hasilnya belum tentu dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas hidup.
3. Rasio Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Ketimpangan distribusi pendapatan terbukti menghambat capaian pembangunan manusia, karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

4. Secara simultan, derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gini berpengaruh signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan IPM harus memperhatikan kombinasi antara tata kelola fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pengurangan ketimpangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah diharapkan terus meningkatkan kemandirian fiskal dengan cara mengoptimalkan potensi PAD melalui inovasi kebijakan dan efisiensi tata kelola. Semakin besar kemampuan fiskal, semakin luas pula ruang untuk meningkatkan pelayanan publik yang menunjang pembangunan manusia.
2. Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas serta mendistribusikan manfaat secara merata, terutama bagi kelompok rentan dan daerah tertinggal di Bali, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada agregat angka, tetapi juga pada kualitas dan keberpihakannya.
3. Pengurangan ketimpangan pendapatan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah dapat meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mendorong program redistribusi yang adil melalui subsidi, pendidikan gratis, dan jaminan kesehatan.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan variabel tambahan seperti tingkat pengangguran, belanja daerah sektor pendidikan dan kesehatan, serta stabilitas politik lokal untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi IPM.
5. Pemerataan pembangunan antarwilayah sangat penting bagi Provinsi Bali, terutama mengingat adanya kesenjangan IPM antara daerah yang padat pariwisata seperti Denpasar dan Badung dengan daerah yang lebih tertinggal seperti Karangasem dan Bangli. Pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berbasis karakteristik lokal perlu diperkuat.